

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Turki adalah negara berpaham sekuler yang pada awalnya merupakan kesultanan besar dimasa Dinasti Utsmany yang kini telah menjadi Republik Turki. Sejak runtuhnya daulah ustmaniyah, rezim republican Kemal Pasha yang dengan sebutan Atatürk, telah meninggalkan semua warisan dari sistem pemerintahan Islam dan lebih memilih membangun bangsa turki dengan caranya sendiri dengan versi pemerintahan ala bangsa barat. Di bawah Pemerintahan Kemal, Turki mengalami perubahan radikal bahkan dengan perubahan revolusioner dari orde lama ke orde baru. Kemal dengan negara barunya memperlihatkan kecenderungan yang sangat berbeda, Ia menegaskan bahwa Turki sebagai republik baru harus memperjuangkan cita-cita demokrasi seperti barat.

Sejarah Turki selama 150 tahun terakhir memberikan contoh keberhasilan pertemuan peradaban Barat dan Timur. Ini merupakan masa dimana suatu masyarakat yang termasuk dunia budaya Muslim berhadapan dengan institusi, nilai dan konsep yang bermunculan di dunia Barat. Selama masa ini, telah berhasil dilakukan usaha untuk mengadopsi dan menanamkan atribut-atribut peradaban Barat. Hal ini merupakan proses yang berkelanjutan dan stabil, walaupun ada beberapa interupsi

dari waktu ke waktu, dari Tanzimat (Gerakan Reformasi) pada tahun 1839 sampai Me?rutiyet (Pemerintahan Konstitusi) pertama tahun 1876 dan kemudian tahun 1908, sampai Republik pada tahun 1923, dan dari Republik ke Demokratisasi pada tahun 1946. Dalam konteks ini, perkembangan yang terjadi di Turki perlu dilihat sebagai pendalaman proses Westernisasi yang menyusupi strata sosial yang lebih luas, dan bukan regresi keberhasilan perjalanan tersebut (Yayla, 2004).

Perubahan yang terjadi pada sistem politik-pemerintahan (dari monarkhi absolut ke demokrasi republik) dan ekonomi (dari tradisional ke liberal) ini, ternyata memberikan dampak yang sangat signifikan bagi Turki dalam membangun hubungan dan pengaruh politik di tingkat regional (Timur Tengah) maupun di tingkat dunia (Barat). Semakin kompleksnya perubahan yang terjadi di ranah domestik Turki (ekonomi, politik, sosial dan keamanan) serta semakin dipertimbangkannya posisi Turki di kancah internasional, seolah mendorong Turki untuk melakukan upaya reorientasi paradigma atas kebijakan politik luar negerinya. Turki menjadi lebih moderat dan akomodatif terhadap kepentingan semua pihak (Barat maupun Timur Tengah).

Berbeda dengan pendahulunya, Turki pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi / Justice and Development Party/ Partai Keadilan dan Pembangunan*) telah membawa perubahan luar biasa pada Turki, terutama dalam percaturan hubungan internasional. Hal tersebut terlihat ketika Turki mampu merumuskan sebuah kebijakan luar negeri yang

komprehensif, tidak terdiktomi dalam polar kekuatan dunia dan menekankan pada aspek soft power (kekuatan ekonomi-politik dan kebudayaan/pengetahuan) (Saputra, 2013).

Kebijakan yang diterapkan dari tahun 2002 hingga tahun 2010 ini berhasil memberi dampak positif yang sangat signifikan untuk pertumbuhan kualitas ekonomi dan politik di Turki. Kebijakan bertetangga Turki dengan doktrin baru yang dibawa oleh pemerintahan Recep Tayyip Erdogan dengan partai AKP nya membuat hubungan Turki semakin erat dengan beberapa negara tetangga termasuk beberapa negara tetangga yang dianggap sebagai "saingan"dari Eropa seperti Rusia, dan beberapa negara di Timur Tengah seperti Iran dan Suriah, bahkan mulai juga melakukan hubungan yang baik dengan wilayah otonomi Kurdi di Irak utara yang dalam beberapa dekade sempat memiliki hubungan yang buruk.

Di dalam negeri sendiri, Erdogan memang dianggap mampu membuat Turki sebagai kekuatan ekonomi-politik di Timur Tengah dan Eropa, di saat negara-negara Eropa tertimpa krisis dan defisit pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009. GDP (gross domestic product). Turki mengalami peningkatan yang pesat dan pendapatan turki telah menempati urutan ke 16 terbesar di dunia serta masuk ke dalam negara G-20. Selain itu pertumbuhan ekonomi Turki pasca krisis ekonomi 2008-2009 juga tercatat sebagai Negara yang tercepat pulihnya dengan pertumbuhan sebanyak 5%.

Sejalan dengan Kebijakan politik luar negeri Turki guna menancapkan

pengaruhnya ke Negara-negara Timur Tengah, Turki pun mulai menjalin hubungan dengan Negara Mesir. Seperti yang diketahui bahwa Mesir merupakan Negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia Arab setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Aljazair. Mesir mempertahankan tingkat 7% pertumbuhan pertahun pada periode 2005-2008 sebagai akibat dari proses liberalisasi, tetapi kemudian menurun menjadi sekitar 4% pertumbuhan pada tahun 2009 akibat krisis ekonomi global. Total ekspor Mesir pada tahun 2009 adalah 23, 9 miliar dolar, sementara impor adalah 46, 6 miliar dolar. Kerjasama ekonomi masih merupakan kekuatan pendorong dalam pengembangan hubungan Turki-Mesir (Yazdır, 2011).

Hubungan Turki dan Mesir mulai berjalan dengan lancar setelah Mesir mengakhiri hubungan kerjasamanya dengan Uni Soviet dan lebih dekat dengan Amerika Serikat. Hal itu dapat terjadi karena sejak kepemimpinan Kemal Pasha Attaturk, Turki juga lebih berpihak dengan blok sekutu daripada blok komunis. Turki sendiri merupakan salah satu anggota aliansi militer NATO. Sehingga menjadikan Turki sebagai kepanjangan tangan kepentingan negara-negara Barat di Timur Tengah yang banyak beroperasi untuk mengimplementasikan kepentingan Barat. Jadi telah sepatutnya pada saat Mesir mulai berpaling dari Uni Soviet, mulai terlihat proses membaiknya hubungan diantara Turki dan Mesir. Kemudian dimulailah kerjasama ditingkat bilateral maupun regional. Mesir pada era kepemimpinan Husni Mubarak juga telah menjadi mediator dalam membantu penyelesaian Krisis Oktober 1998 antara Turki dan Suriah. Dan pada tahun yang sama pula terjadi kerjasama ekonomi

yang mendorong level perdagangan hingga \$1miliar (Kemal, 2002). Perjanjian perdagangan pertama antara Turki dan Mesir ditandatangani di Kairo pada tahun 1966, yang kedua di Ankara pada tahun 1976 dan yang ketiga di Kairo pada tanggal 4 Oktober 1996.

Keharmonisan hubungan Turki dan Mesir makin terlihat setelah ditandatanganinya Free Trade Agreement pada tahun 2005 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2007. Perdagangan Turki dengan Mesir meningkat dua setengah kali dalam tiga tahun sebagai akibat dari Perjanjian Perdagangan Bebas tersebut. FDI Turki di Mesir juga meningkat dari sekitar \$ 60 juta pada tahun 2005 menjadi \$1,5 miliar pada 2010. Ekspor Mesir ke Turki pun terus meningkat dan mencapai \$1,6 miliar pada tahun 2012. Sedangkan Ekspor Turki ke Mesir meningkat hingga \$3,2 miliar pada tahun 2012. Dari segi politik, Turki makin memperlihatkan pengaruhnya di Mesir ketika terjadi Arab Spring pada tahun 2011 yakni pada saat penggulingan rezim Hosni Mubarak. Turki tampil sebagai Negara pendukung demokrasi di Negara tersebut hingga menjalin hubungan baik dengan Presiden Mesir terpilih selanjutnya yakni Mohammad Morsi.

Baik secara politik dan ekonomi, Mesir dan Turki mengembangkan hubungan yang lebih kuat di bawah pimpinan Mohammad Morsi. Kunjungan resmi ke Ankara oleh Morsi pada 30 September 2012 dilakukan guna Turki memberikan pinjaman langsung dan dana investasi terhadap Mesir. Pada saat itu Turki telah sepakat untuk memberi bantuan sebesar dua miliar dolar AS guna memperkuat ekonomi Mesir

pasca revolusi. Selain itu pada 17 November 2012, Perdana Menteri Erdogan melakukan perjalanan ke Kairo untuk bergabung dengan Perdana Menteri Mesir, Hisham Qandil, di Mesir-Turki Ekonomi Forum, di mana kepala Dewan Bisnis Mesir-Turki menerangkan mengenai upaya Morsi untuk membuka jalan lebih lanjut bagi Turki untuk menanamkan investasi di dalam negeri Mesir.

Hubungan bilateral antara Mesir dan Turki mulai memburuk sejak naiknya Presiden baru Mesir yakni Abdel Fattah Al-Sisi pada 2013 lalu. Sejak kudeta militer terjadi di Mesir tersebut, hubungan Turki-Mesir memburuk termasuk dalam hubungan perdagangan. Otoritas Mesir melarang truk tronton dan kapal Turki untuk melintas di wilayah Mesir dalam perjalanan menuju negara-negara Teluk. Ahmad Amin, penasehat Menteri Transportasi Mesir untuk Urusan Transportasi Laut mengatakan, bahwa kebijakan ini diambil oleh kementeriannya setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan beberapa pihak terkait lainnya. Mereka semua sepakat untuk menghapus kesepakatan dagang dengan pemerintah Turki, dan tidak melakukan perpanjangan kerjasama setelah MOU berakhir pada akhir bulan Maret 2015 lalu. Ia mengatakan bahwa keputusan ini akan dijalankan pada awal April tahun depan (Syarieff, Dakwatuna, 2014).

Kini, hubungan Mesir dan Turki memasuki fase “krisis” pasca diusirnya Duta Besar Turki untuk Mesir, Avni Botsali. Mesir dan Turki menurunkan taraf hubungan diplomatik November 2013 lalu dengan aksi saling usir duta besar dengan label “persona non-grata”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis eksplorasi di atas, maka rumusan masalahnya adalah mengapa politik luar negeri Turki dibawah Recep Tayyip Erdogan berubah menjadi lebih konfrontatif terhadap Mesir pasca digulingkannya rezim Morsi?

## **C. Landasan Teoritis**

Dalam menganalisa sebuah kebijakan politik luar negeri diperlukan suatu teori, konsep, maupun model yang berkaitan dengan pembuatan keputusan luar negeri. Dalam setiap penelitian, teori selalu menjadi bagian yang sangat penting karena teori inilah yang akan membimbing penulis untuk menjawab setiap pertanyaan yang telah dikemukakan dalam pokok permasalahan. Dalam menganalisa sebuah kebijakan politik luar negeri diperlukan suatu teori, konsep, maupun model yang berkaitan dengan pembuatan keputusan luar negeri. Teori yang akan penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah diatas adalah Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (William D.Coplin).

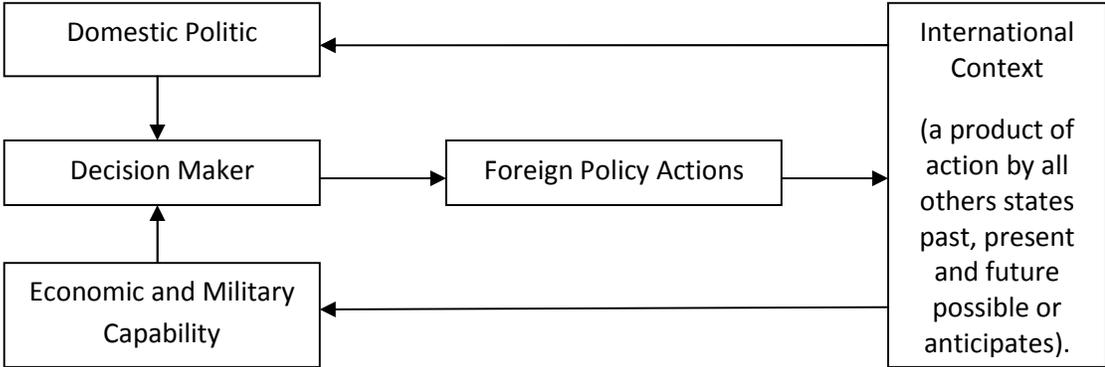
Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (William D.Coplin).

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses

pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya. William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh 3 hal yakni, kondisi politik dalam negeri kapabilitas ekonomi dan militer dan konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (D.Coplin & Marbun, 2003). Berikut adalah model teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Gambar 1. 1

Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin



a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan “policy influencer”. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan.

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan policy influencer. Policy influencer merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dll. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya. Teori William D Coplin tersebut

diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem politik. Menurut Easton, Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negara atau dalam bahasan Easton disebut sebagai input. Input tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politis, baik dalam lembaga legeslatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan di lembaga politik.

Pada 2013 lalu, skandal korupsi yang telah melukai pemerintahan Islam Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan merupakan masalah yang kompleks dengan konsekuensi penting bagi politik, ekonomi, masyarakat dan kebijakan luar negeri Turki. Skandal target suap yang dituduhkan kepada Perdana Menteri Turki sekaligus pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) ini telah mempengaruhi masa depan politik Turki. Erdogan menuduh pemerintah asing yang menjadi salah satu pihak yang memprovokasi adanya demonstrasi melawan Pemerintahannya. Demonstrasi besar-besaran anti-pemerintah pada juni 2013 lalu yang bertempat di Taman Gezi memberi pukulan telak terhadap Erdogan. Skandal korupsi menjadi satu alasan penting masyarakat untuk berunjuk rasa menentang pemerintah. Ambisi Erdogan untuk menjadi pemimpin bangsa dalam sejarah Turki modern (yang sama dengan Kemal Ataturk) telah terhenti.

Erdogan mengklaim bahwa skandal suap 'adalah konspirasi yang disutradarai oleh organisasi-organisasi asing yang berusaha untuk merusak prestise Turki di mata Internasional. Seperti halnya penggulingan rezim / kudeta yang terjadi di Negara-negara Timur Tengah, Turki pun memiliki kekhawatiran akan terjadinya hal tersebut di Negaranya. Hal ini dikarenakan Turki memiliki *track record* beberapa kali kudeta militer yakni pada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997. Apa yang terjadi di Mesir dan tergulingnya Muhammad Morsi oleh militer rupanya menjadi pelajaran bagi sejumlah negara kawasan. Turki adalah salah satu negara kawasan yang memiliki kekhawatiran kondisi di Mesir dapat terulang di Ankara. Apalagi kondisi negara ini dalam beberapa pekan terakhir mulai dipicu sejumlah kerusuhan.

Kudeta Mesir juga memberi angin bagi kelompok sekuler yang tengah menentang pemerintahan yang condong Islami, seperti di Turki dengan partai AKP. Di Turki kelompok sekuler masih terus menggoyang pemerintahan Recep Tayib Erdogan. Tapi Erdogan bertindak tegas. Polisi anti huru hara Turki pada hari Sabtu, 13 Juli 2013 lalu menembakkan peluru karet, gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang mencoba untuk memasuki Istanbul Square sebagai kelanjutan kerusuhan mematikan itu melanda negara itu sejak bulan Juni.

Khawatir tindakan militer Mesir menular ke Turki, Parlemen Turki pada hari Rabu (10/7) mengamandemen aturan militer agar tidak membuka jalan bagi intervensi militer dalam politik. Ini adalah langkah lain sebagai upaya pemerintahan

pro-Islam untuk mengendalikan kekuatan militer terhadap kemungkinan kudeta. Eskalasi krisis politik dalam negeri bisa memprovokasi ketidakstabilan di Turki dan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki untuk memainkan peran pentingnya di Timur Tengah (Protopapas, 2014). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri serta kepentingan Turki sendiri, dibutuhkan stabilitas keamanan dari Negara-negara tetangga Turki seperti halnya Mesir agar instabilitas keamanan yang terjadi di Mesir tidak terjadi di Turki.

#### b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variable yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja. Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variable ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Dalam era industri modern, jika ekonomi mampu memproduksi barang secara masal maka ia juga mempunyai kemampuan untuk menghancurkan masal melalui industry senjata yang semakin destruktif. Jika tanah dan emas menjadi tolak ukur diabad feodal, maka kemajuan industri menduduki posisi penting dalam era modern ini. Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “panggung” politik internasional. Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (bargaining position) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negaralain terhadap kebijakan luarnegeri suatu negara.

Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.

Kemenangan dan popularitas Erdogan telah berhasil mengubah Turki dan meletakkan fondasi ekonomi negeri itu hingga sekarang menempatkan posisi Turki sebagai negara ke empat terbesar ekonomi di Eropa dan Negara yang memiliki tingkat perekonomian terbesar ke-17 di dunia dengan GDP sebesar USD 774,2 miliar. Selama tiga tahun terakhir, Turki telah menjadi salah satu ekonomi paling cepat berkembang, dengan target yang ambisius untuk menjadi salah satu dari sepuluh

ekonomi terbesar di dunia dengan 2023. Sejalan dengan kondisi peerekonomian Turki yang terus mengalami perkembangan, kekuatan militer Turki juga tengah mengalami hal yang sama. Hal ini dibuktikan bahwa Turki menduduki peringkat pertama dalam kekuatan militer di Timur Tengah. Dengan kemampuan militer dan ekonomi yang semakin baik, Turki dapat terlibat aktif dalam sistem politik dikawasan dan lebih mandiri menentukan kebijakan luar negerinya.

Kerjasama dalam bidang perdagangan yang terjadi Antara Turki dan Mesir merupakan salah satu kerjasama yang strategis di wilayah Timur Tengah bagi kepentingan Turki. Namun setelah naiknya Abdel Fattah El Sisi sebagai Presiden Mesir pada 2013 lalu, Mesir mulai mengubah kebijakannya dalam menjalin hubungan perdagangan dengan Turki yakni menghapus kesepakatan dagang dengan pemerintah Turki, dan tidak melakukan perpanjangan kerjasama setelah MOU berakhir pada akhir bulan Maret 2015 lalu. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor berubahnya kebijakan Turki menjadi lebih konfrontatif terhadap Mesir.

#### c. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya. Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang

objektif. Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara mana yang kawan dan yang lawan.

Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang politik.

Hal diatas dapat terlihat pada kasus di Turki pada saat Turki mulai melakukan perubahan kebijakan luar negerinya yang sebelumnya berlangsung harmonis hingga menjadi lebih konfrontatif setelah digulingkannya rezim Morsi di Mesir. Adanya perubahan kebijakan luar negeri Turki tersebut dilakukan sebagai respon atas perubahan rezim yang terjadi di Mesir yakni setelah naiknya Abdel Fattah El Sisi menjadi Presiden Mesir. Hal ini dikarenakan pada saat penggulingan itu terjadi telah mengakibatkan tewasnya ribuan anggota Ikhwan, dipenjarakan puluhan ribu anggota Ikhwan, dan kekerasan yang dilakukan oleh pemimpin baru Mesir tersebut. Turki sangat mengecam adanya kekerasan yang mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan di Mesir. Turki ingin adanya Pemerintahan yang bersih dan tidak

melakukan pelanggaran HAM. Tuduhan yang tidak adil, percobaan pembunuhan dan eksekusi politik di negara harus dihentikan.

Background El Sisi yang berasal dari militer sedangkan Erdogan yang berpaham islam moderat dengan basis pendukung ikhwanul muslimin tentunya akan menyebabkan perbedaan paham dalam pengambilan keputusan diantara keduanya. El Sisi menginginkan Mesir kembali berjaya dibawah kepemimpinan pihak militer seperti layaknya pada era Husni Mubarak dan bukannya hanya berada di bawah bayang-bayang ikhwanul muslimin maupun Erdogan yang dipandang El Sisi selalu mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Namun, di sisi lain Erdogan menginginkan Mesir menjadi Negara demokratis yang dipimpin Morsi yang memiliki basis pendukung yang sama yakni Ikhwanul Muslimin. Faktor perbedaan ideologi inilah yang tentunya akan mengakibatkan perbedaan paham diantara Turki dan Mesir sehingga makin memanasnya hubungan kedua Negara dan semakin sulitnya dalam menjalin hubungan bilateral di masa depan.

#### **D. Hipotesa**

Dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terjadinya perubahan kebijakan pemerintah Turki yang lebih konfrontatif terhadap Mesir pasca digulingkannya rezim Morsi yakni karena:

1. Kekhawatiran Erdogan akan adanya kelompok sekuler yang dapat menjatuhkan kekuasaannya.
2. Pemutusan kerjasama perdagangan oleh Mesir yang berdampak pada menurunnya stabilitas ekonomi dan FDI Turki.
3. Adanya perbedaan ideologi antara Erdogan dan El Sisi yakni Erdogan dengan paradigma islam moderat yang di afiliasi oleh ikhwanul muslimin sedangkan El Sisi yang memiliki background militer dan cenderung bersikap otoriter.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan Turki mengubah kebijakan luar negerinya terhadap Mesir pasca digulingkannya rezim Morsi
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai dinamika politik Turki - Mesir
3. Secara khusus penelitian ini ditujukan demi memenuhi persyaratan akademis pada jenjang studi strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi kajian pada persoalan alasan Turki merubah kebijakan luar negerinya terhadap Mesir pasca digulingkannya rezim Morsi yakni dimulai sebelum terjadinya revolusi di Mesir atau pada tahun 2011-

2015. Jadi, batas penelitian yang dilakukan peneliti hanya sebatas analisis pada penyebab Turki merubah kebijakan luar negerinya terhadap Mesir.

#### **A. Metode Penelitian**

##### a) Jenis Penelitian dan Jenis Data.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif (deskriptif), yang bertujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

##### b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi ilmiah, laporan media, artikel-artikel resmi pemerintah dan laporan lembaga-lembaga internasional mengenai permasalahan yang sedang diteliti (Suharsono, 1996).

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna untuk mempermudah penyusunan bahasan dan uraian-uraian. Sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

Pada Bab Pertama, penulis akan menjelaskan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Alasan pemilihan judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Pada bab kedua ini penulis akan menjelaskan harmonisasi kebijakan luar negeri Turki – Mesir yang didalamnya akan memaparkan tentang: Harmonisasi PLN Turki-Barat Pasca Kekhilafahan Utsmaniyah, Politik Luar Negeri Turki Era Erdogan yang lebih mengarah ke Timur Tengah, Awal Kedekatan Turki – Mesir, Hubungan Erdogan dengan Rezim Morsi

Pada selanjutnya penulis akan membahas tentang politik luar negeri konfrontatif turki terhadap mesir yang didalamnya akan memaparkan tentang : Tergulingnya rezim Morsi dan Kebijakan Konfrontatif Turki terhadap El Sisi.

Pada Bab keempat akan berisi faktor perubahan politik luar negeri Turki terhadap Mesir pasca Morsi yakni kondisi politik dalam negeri turki, Kekhawatiran menurunnya stabilitas ekonomi Turki dan FDI Turki di Mesir akibat adanya pemutusan kerjasama perdagangan oleh Mesir dan Ideologi El Sisi.

Pada bab terakhir berisi Penutup / Kesimpulan yakni berisi ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.